

ABSTRAK

Tesis ini akan menjelaskan dinamika posisi tawar dalam relasi kuasa antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Multinasional dalam investasi akomodasi di Nihi Sumba, Sumba Barat. Penelitian menggunakan pendekatan *foreign direct investment* dan *power and interest framework* untuk meneliti bagaimana strategi Nihi Sumba dalam membangun relasi kepentingan untuk mempengaruhi kebijakan dan mendapatkan insentif investasi lebih besar dari Pemerintah Daerah Sumba Barat yang kala itu baru saja membuka pintu investasi dimana didalamnya terdapat beberapa konflik horizontal, salah satunya adalah dengan masyarakat adat. Pada proyeksinya, investasi *specialist accommodation* Nihi Sumba tidak hanya bertujuan untuk ekspansi bisnis, namun diharapkan dapat berdampak luas terhadap perbaikan ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat sembari memperkenalkan budaya Sumba Barat kepada dunia internasional. Namun pada kenyataannya, Nihi Sumba melakukan sumbangsih terhadap Pemerintah Daerah tidak sebesar yang dijanjikan diawal. Meski demikian, Nihi Sumba tetap mampu mendapatkan insentif investasi dari Pemerintah Sumba Barat karena terbentuknya ketergantungan baik dari Pemerintah Sumba Barat melalui Pendapatan Asli Daerah, maupun dari Masyarakat Adat yang merasa hidupnya lebih baik dengan adanya Nihi Sumba. Terlebih, setelah Pemerintah Pusat juga memberikan rekognisi atas positifnya keberadaan Nihi Sumba. Jangka waktu penelitian akan dimulai saat pembangunan Nihi Sumba pada 1990, hingga pada masa pemerintahan Bupati Dapawole untuk turut mengidentifikasi mengapa Pemerintah Daerah memiliki posisi tawar yang lebih rendah dibandingkan Nihi Sumba dengan analisa berbagai aktor hingga akhir kuartal ke-III tahun 2019.

Kata Kunci: Nihi Sumba, *Foreign Direct Investment*, Posisi Tawar Pemerintah Daerah

ABSTRACT

This thesis will explain the dynamics of the bargaining position in the power relationship between local governments and multinational companies in accommodation investment in Nihi Sumba, West Sumba. The study used Foreign Direct Investment approach and Power and Interest Framework to examine how Nihi Sumba's strategy in building relations of interest to influence policy and get greater investment incentives from the West Sumba Regional Government, which at that time had just opened the door to investment where there were some horizontal conflicts, one of them is with the indigenous peoples. In the projection, Nihi Sumba's investment in specialist accommodation is not only aimed at business expansion, but is expected to have a broad impact on economic improvement, education and public health while introducing West Sumba culture to the international community. However, in reality, Nihi Sumba did not contribute as much to the Regional Government as promised earlier. Even so, Nihi Sumba was still able to get investment incentives from the West Sumba Government because of the formation of dependence both from the West Sumba Government through Local Original Income, as well as from Indigenous Peoples who felt that their lives were better with Nihi Sumba. Moreover, after the Central Government also gave recognition for the positive existence of Nihi Sumba. The research period will begin during the development of Nihi Sumba in 1990, until the reign of Regent Dapawole to help identify why the Local Government has a lower bargaining position than Nihi Sumba with the analysis of various actors until the end of the third quarter of 2019.

Keywords: Nihi Sumba, Foreign Direct Investment, Local Government Bargaining Position